

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya keuangan menjadi dasar terlaksananya segala kegiatan yang berhubungan dengan *financial*. Terutama pada suatu negara, jelas suatu negara membutuhkan pengelolaan keuangan yang sangat efektif dan efisien sebagai strategi jitu terlaksananya suatu pembangunan dan dapat memberikan kontribusi yang akurat untuk semua yang ada pada negara tersebut, akan tetapi maraknya penyelewengan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), keuangan negara tentu saja menjadi bukti nyata tidak efisien dan efektifnya sebuah pengelolaan keuangan negara, bahkan mungkin penyelewengan tersebut dapat dijadikan suatu kegagalan besar terhadap pengelolaan keuangan suatu negara.

Bangkitnya era reformasi bangsa indonesia pada tahun 1998 yang ditandai oleh adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan negara indonesia, merubah seluruh tatanan kehidupan bangsa telah membawa kehidupan bangsa indonesia kearah perubahan paradigma secara multi kompleks, termasuk perubahan paradigma dari tatanan keuangan negara yang transparan, profesional dan akuntabel. Seiring dengan dinamika yang terjadi ditengah masyarakat, pemerintah indonesia menetapkan paket undang-undang bidang keuangan negara nomor 17 tahun 2003 dan undang-undang nomor 51 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan negara. Reformasi di bidang keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya undang-undang keuangan negara tersebut, menandai semangat baru dalam pengelolaan sumber

daya negara secara transparan, profesional, akuntabel dan berkeadilan. mengelola penyajian laporan keuangan yang ada di instansi pemerintah yaitu, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan dirjen perbendaharaan nomor PER-57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), beragam inisiatif penyempurnaan pada aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, serta dukungan kemudahan dengan mengakomodasi kemajuan teknologi informasi INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov (e-Government atau Pemerintahan Secara Elektronik), merupakan beberapa faktor penentu utama capaian tersebut. Capaian ini memungkinkan penyempurnaan lebih intensif pada efisiensi dan efektivitas proses di tingkat internal manajemen pemerintah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Instansi pemerintah yang merupakan pemegang kuasa pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berpatokan pada tujuan rencana kerja pemerintah (RKP), maka dalam mengelola dana anggaran semuanya itu tidak luput dari kinerja anggaran belanja, yang merupakan penilaian dan pengukuran terhadap pelaksanaan atau realisasi dari anggaran yang dituangkan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh kementerian negara/lembaga antara lain, laporan realisasi anggaran yang merupakan salah satu laporan keuangan yang di publikasikan untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penilaian kinerja keuangan.

Laporan realisasi anggaran ini merupakan jenis laporan keuangan yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Dalam laporan realisasi anggaran memuat tentang semua aktivitas realisasi anggaran. Dapat dilihat bahwa APBN yang merupakan tulang punggung penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan dan yang memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, (alat untuk mempertahankan keseimbangan fundamental perekonomian negara), distribusi, (harus memperhitungkan keadilan dan kepatuhan) alokasi sumber daya publik, (mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian), perencanaan, (Anggaran negara pedoman untuk perencanaan kegiatan), dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (menjadi pedoman untuk penilaian kegiatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan yang utama. Bab VIII pasal : 30. Angka (2) UU No.17 Tahun 2003, tentang keuangan negara. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut, pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan.

Mahmudi (2010:135) menguraikan analisis pada belanja sangatlah penting untuk dilakukan karena belanja merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dan belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena kepentingan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pelayanan pemerintah selain itu masyarakat pemberi dana publik melalui

pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Halim (2011:127) menguraikan sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Mahmudi (2010:155) menguraikan setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Mahsun (2009:25) menguraikan kinerja (performa) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau strategi, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Mahmudi (2010:156) menguraikan berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran, dapat membuat analisis belanja, dengan alat analisis antara lain: Analisis varians belanja, untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan

realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa besar pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Misalnya dengan melihat pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat menggunakan analisis pertumbuhan belanja. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan rasio efisiensi belanja dan efektifitas belanja. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja, diantaranya dengan rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja, analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan bagaimana instansi memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja yang digunakan oleh instansi.

Fika Widya Apriyanti, Shita Tiara, Ratna Sari Dewi (2019). Melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil penelitian analisis varians belanja menunjukkan kinerja yang baik, dengan melakukan penghematan anggaran belanja. Akan tetapi penyerapan anggaran belanja masih belum terserap sepenuhnya. Hasil analisis pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa kinerja mengalami pertumbuhan

negatif -15,93%, yang artinya daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan belanja daerah. Hasil Analisis Keserasian Belanja, antar lain rasio belanja operasi dan rasio belanja modal terhadap total belanja, secara umum dana belanja lebih dioptimalkan untuk belanja operasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kinerja yang kurang baik karena belanja operasi dan belanja modal lebih besar (>) dari proporsi belanja yang ditetapkan yaitu belanja operasi sebesar 60-90% dan belanja modal dengan proporsi belanja antara 5-20%. Dan hasil analisis efisiensi belanja, daerah telah melakukan penghematan anggaran belanja cukup efisien, terbukti dengan rata-rata rasio efisiensi mencapai sebesar 90,29%, yang tidak melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa daerah telah melakukan efisiensi belanja.

Anastasia Friska Palilingan, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikere (2018). Melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Hasil penelitian dilihat dari Analisis Varians belanja secara umum kinerja daerah dapat dikatakan baik karena dari realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya rata-rata sebesar 90,75%. Hasil analisis pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif Rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 23,4%, dan pertumbuhan belanja cenderung fluktuatif.

Tantri dan Irmawati tahun (2018). Penelitian dengan judul Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta (2018). Hasil penelitian dilihat dari Analisis Varians Belanja. Menunjukkan

kinerja yang baik, sesuai dengan kategori varians belanja yang di katakan Mahmudi (2007), bahwa kinerja anggaran dikatakan baik jika penggunaan realisasi anggaran lebih rendah dari pada jumlah yang dianggarkan. Hasil penelitian pertumbuhan belanja daerah dapat dikatakan cukup fluktuatif di antaranya disebabkan oleh faktor inflasi dan adanya program yang tidak terselenggara. Hasil penelitian analisis keserasian belanja menunjukkan daerah sudah melakukan harmonisasi belanja. Hal ini dibuktikan dengan pro-porsi belanja operasi yang lebih besar dari belanja modal, Belanja langsung yang proporsinya lebih besar dari belanja tidak langsung. Dan hasil penelitian efisiensi belanja hal ini dibuktikan dengan rasio efisiensi yang kurang dari 100%.

Stasiun Meteorologi El Tari adalah Kementerian/Lembaga sebagai perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika di daerah, dalam mengemban tugas pelayanan penerbangan pada Bandar Udara El Tari Kupang, juga di beri tanggung jawab untuk mengelolah dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan yang akan di digunakan untuk melaksanakan semua aktivitas sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi Standar Akuntansi Pemerintah. PP Nomor. 71 Tahun 2010 yang dapat dilihat dalam lampiran 1.

Pada lampiran 1 dapat dilihat hasil analisis kinerja belanja pada Stasiun Meteorologi El Tari Kupang tahun 2016- 2019, dilihat dari varians belanja secara keseluruhan dikantakan baik, ditunjukan dengan telah melakukan

penghematan anggaran belanja, dimana belanja pegawai, belanja barang, belanja modal tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan. Namun dari penghematan anggaran belanja yang dilakukan terlihat pada sub- pos belanja dan pos belanja belanja masih menyisakan anggaran yang belum terserap sepenuhnya.

Dilihat dari pertumbuhan belanja fluktuatif setiap tahunnya. Dilihat dari keserasian belanja, terlihat tidak serasi dimana belanja secara keseluruhan tahun 2016-2019, cenderung berorientasi kepada belanja operasi dari pada belanja modal, yang sangat kecil anggaran dan belanja. Padahal sebagai pelaksana teknis peruntukan anggaran belanja modal untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan sangat membutuhkan saran teknis yang memiliki jangka waktu pemanfaatan yang lama. Sedangkan dilihat dari efisiensi belanja secara keseluruhan telah melakukan efisiensi belanja atau dapat secara keseluruhan pelaksanaan belanja dapat dikatakan efisien, karena dalam pembelanjaan tidak melebihi anggaran belanja.

Rencana Kerja Tahunan (RKT), dengan alokasi anggaran yang diberikan yang tertuang dalam perjanjian kerja (PK), sebagai acuan kinerja yang akan di capai, pada tahun bersangkutan dalam rangka perwujudan pelaksanaan kinerja pembangunan Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, dengan tujuan penyusunan (RKT), sebagai dasar dalam penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran, dan perjanjian kinerja (PK), sebagai tanggung jawab pelaksanaan program kerja dengan anggaran yang disediakan di Stasiun Meteorologi El Tari Kupang dan sebagai acuan dalam penetapan kinerja tahunan. Sebagai alat untuk menilai

keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Rencana Kerja Tahunan Stasiun Meteorologi El Tari Kupang yang merujuk kepada rencana kerja pemerintah (RKP), yang dapat di ukur tingkat ketercapaian kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran belanja. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA UPT STASIUN METEOROLOGI EL TARI KUPANG TAHUN ANGGARAN 2016-2019”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaiman gambaran kinerja belanja dilihat dari varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, efisiensi belanja pada UPT Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Tahun Anggaran 2016-2019?
2. Bagaimana ketercapaian kinerja belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dengan perjanjian kinerja Pada UPT Stasiun Meteorologi El Tari Tahun Anggaran 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui verians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, efisiensi belanja pada UPT Stasiun Meteorologi El Tari Tahun Anggaran 2016-2019.
2. Mengetahui ketercapaian belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dengan perjanjian kinerja pada UPT Stasiun Meteorologi El Tari Kupang tahun Anggaran 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dijabarkan menjadi manfaat teoritis dan praktis,

berikut uraiannya.

1. Manfaat Praktis :

a. Bagi peneliti

sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kinerja belanja.

b. Bagi Instansi

Bagi instansi, sebagai saran dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Dunia Pendidikan

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi dan pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Instansi Terkait

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu organisasi atau instansi dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan kebijakan untuk anggaran tahun yang akan datang.